

Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

Thanwain^{✉1}, Nur Fadhila Amri²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa, Indonesia

Abstrak

Aset tetap adalah aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang dengan standar akuntansi pemerintah. Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis komparatif. Perbandingan adalah metode analisis penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan data dari objek penelitian dengan data pembanding. Hal ini dilakukan dengan membandingkan perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07. Untuk klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penghentian dan eliminasi, serta penyusutan sudah sesuai dengan kebijakan PSAP Nomor 07 Tahun 2010.

Kata Kunci: *Aset Tetap; PSAP 07.*

Copyright (c) 2022 Thanwain

✉ Corresponding author :

Email Address : thanwain@universitasbosowa.ac.id

PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki pengaruh startegis dari segi hukum, dan ekonomi yang dideklarasikan pada tahun 1999 adalah otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerinthan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU RI Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 5). Dengan diberlakunya Otonomi Daerah maka setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia diharuskan untuk melakukan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolah Keuangan Daerah.

Aset tetap yang digunakan dalam laporan keuangan mempunyai masa atau periode akuntansi yang berguna dalam rekap pembuatan laporan keuangan (Rabiyah dkk, 2021). Dalam memanfaatkan aset tetap perusahaan harus mempergunakan aset tetap secara baik dalam profesi yang signifikan terhadap jumlah aset yang dimiliki dalam perusahaan (Herison dkk, 2022). aset tetap mempunyai batas tertentu dalam penggunaan untuk kepentingan perusahaan, dimana aset tetap bisa juga tidak difungsikan kembali untuk kemajuan perusahaan. Sehingga aset tetap dapat

dihentikan (Amri dkk, 2022). Penghentian aset tetap dapat dilakukan dengan menjual kembali atau ditukarkan kembali untuk kepentingan perusahaan. Aset tetap adalah aset permanen atau jangka panjang yang digunakan dalam operasi normal perusahaan (Ismail dkk, 2022).

Aset tetap memiliki peran penting untuk kelancaran oprasioanal perusahan untuk memaksimalkan peran ini membutuhkan kebijakan tepat dalam menejemen aset tetap (Baso dkk, 2020). Dalam keadaan ini, pengambilan keputusan tentu sangat diperlukan alat informasi mengenai aset tetap, seperti akuntansi aset tetap. Sejak 22 Oktober 2010, Pemerintah telah menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang hal yang sama. Dalam PP 71 Tahun 2010 terdapat dua SAP yaitu SAP Berbasis AkruaI yang tercantum dalam Lampiran I, dan SAP berbasis *Cash-to-Accrual* yang terdapat dalam Lampiran II (lampiran yang memuat kembali semua aturan yang ada dalam PP. 24 Tahun 2005 tanpa perubahan sedikitpun). Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual mulai berlaku pada tanggal Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 diundangkan.

Pernyataan standar akuntansi pemerintahan Nomor 07 adalah standar yang mengatur tentang aset tetap. Tujuan aset tetap ini adalah mengatur perlakuan akuntansi aset tetap. Baik itu pengakuan, prmhukuran atau pengungkapan yang digunakan. Apakah akuntansi aset tetap yang dilaksanakan sudah sesuai dengan standar yang sudah diterapkan oleh pemerintah (Karim, 2020), seperti yang disebutkan dalam PSAP Nomo 07 tentang aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan dalam kegiatan oprasional perusahaan (Hasniati dkk, 2022).

Mengingat pentingnya perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan. Maka kekeliruan dalam penilaian dan pencatatan serta kebijakan tentang aset tetap berwujud akan mempengaruhi laporan keuangan secara material, sehingga menjadi laporan keuangan tidak wajar (Ardana & Lukman, 2016). Penyajian aset tetap dalam laporan keuangan secara wajar dan benar akan sangat membantu manajemen perusahaan dalam menyampaikan informasi keuangan (Idris, 2019) yang dapat dipercaya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dapat digunakan untuk menentukan kegiatan prospektif perusahaan serta dalam pengambilan keputusan untuk memperbaiki kinerja perusahaan dalam mengefisiensikan aset tetap tersebut (Syamsuddin dkk, 2022).

Untuk menghitung penyusutan ini ada beberapa metode yang digunakan seperti, metode garis lurus, metode saldo menurun, yakni tebagi dua yaitu, mtode jumlah angka tahun dan metode saldo menurun berganda (Raki, 2019). Ada tiga faktor yang dipertimbangkan untuk menentukan beban penyusutan yaitu, harga perolehan, nilai residu, taksiran umur ekonomis dari aset tersebut sehingga perusahaan perlu menerapkan suatu system informasi akuntansi aset tetap untuk dapat mengestimasi secara akurat umur ekonomis aset tetap tersebut (Setiawan dkk, 2020). Hal ini sangat penting karena estimasi ekonomis yang akurat perusahaan dapat mentafsirkan masa pengguna aset tetap tersebut secara lebih efektif.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Enrekang merupakan lembaga Pemerintah yang melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang menyangkut di bidang penerimaan, belanja, pembiayaan dan aset

daerah (Karim dkk, 2021). Adapun aset tetap yang dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Enrekang yaitu tanah, gedung dan bangunan, mesin dan lain-lain. Maka dalam hal ini dibutuhkannya suatu penelitian untuk mengetahui sejauh mana Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang dapat diterapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku di Indonesia (Karim, 2020).

METHODOLOGI

Penelitian ini dilakukan di Badan keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Enrekang. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan yang dimulai dari bulan Maret – April 2022. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Oleh karena itu, peneliti harus menggunakan teknik pengumpulan data yang tepat. Ketepatan dalam menentukan dan memilih teknik pengumpulan data merupakan salah satu syarat keberhasilan penelitian. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang tepat diharapkan dapat memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang valid dan informasi yang dibutuhkan dapat saling melengkapi (Jumarding dkk, 2021).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan rincian sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*Field Researd*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mengadakan kunjungan secara langsung kepada obyek penelitian yang telah ditetapkan.
2. Dokumentasi ialah sumber pengumpulan data melalui pencatatan secara langsung khususnya pada pembelian aset tetap, penghentian aset tetap, penyusutannya sampai pada penyajian dan pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan serta menyalin hal-hal yang dipandang perlu dan mendukung dalam penelitian ini.
3. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan pimpinan dan staf perusahaan untuk memperoleh informasi yang berkaitan langsung dengan aktiva tetap perusahaan dan dengan alasannya.
4. Observasi adalah teknik yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan tepat tentang objek yang diteliti melalui pengamatan langsung terhadap objek, subjek dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pada setiap bagian. Teknik ini akan dilakukan untuk melengkapi data yang telah dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Dalam penelitian ini penelitian juga menggunakan dua sumber data, yakni data primer dan data sekunder. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif. Analisis merupakan penguraian suatu pokok secara sistematis dalam menentukan bagian, hubungan antar bagian serta hubungannya secara menyeluruh untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat. Metode Komparatif adalah metode analisis (Karim dkk, 2022) penelitian

yang dilakukan dengan cara membandingkan data dari objek penelitian dengan data pembanding. Hal ini dilaksanakan yaitu dengan cara membandingkan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang berdasarkan SAP No 07 tahun 2010.

Variabel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan dan perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya).
2. Perlakuan akuntansi aset tetap adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan pada aset tetap mulai dari perolehan aset tetap, penyusutan aset tetap hingga pelepasan aset tetap. Perlakuan akuntansi aset tetap harus dilakukan dengan benar karena adanya keterkaitan perhitungan, guna melakukan perhitungan pada penyusutan aset tetap. Sementara pelepasan aset tetap dihitung berdasarkan aset tetap setelah penyusutan.
3. Aset tetap dalam akuntansi adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
4. Pengakuan dan pengukuran aset tetap adalah aset tetap dicatat (diakui) dalam laporan keuangan yang dilakukan pada awal perolehan aset tetap juga dilakukan pada periode setelah aset tetap tersebut diperoleh.
5. Pelepasan aset tetap adalah kegiatan pengurangan jumlah aset yang dilakukan perusahaan karena berbagai alasan, salah satunya karena habisnya masa manfaat dan umur ekonomis aset tersebut.
6. Penyajian aset tetap adalah penyajian dalam neraca yang harus dilaporkan sebesar harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan.
7. Pengungkapan aset tetap adalah entitas harus mengungkapkan dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah untuk memperoleh aset tetap, penyusutan dan metode penyusutan aset tetap tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Aset Tetap Badan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Enrekang Dengan PSAP Nomor 07.

Tabel 1. Perbandingan Pencatatan Aset Tetap

Pembagian Aset Tetap Dengan PSAP Nomor 07	Pembagian Aset Tetap Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang	Ket.
Tanah	Tanah	Sesuai
Peralatan dan mesin	Peralatan dan mesin	Sesuai
Gedung dan bangunan	Gedung dan bangunan	Sesuai
Jalan, irigasi dan jaringan	Jalan, irigasi dan jaringan	Sesuai
Aset tetap lainnya	Aset tetap lainnya	Sesuai
Konstruksi dalam pengerjaan	Konstruksi dalam pengerjaan	Sesuai

Sumber: Data diolah, 2022.

Pada tabel diatas pembagian yang dilakukan badan keuangan dan aset Daerah Kabupaten Enrekang terhadap aset tetapnya sudah sesuai dengan atau tidak ada perbedaan dengan SAP sehingga dapat disimpulkan tingkat kesesuaian 100% menunjukan tidak ada masalah dalam pengkalisifikasian ini karena sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku pada umumnya.

Tabel 2. Aset Tetap Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019

Nama aset	Tahun 2019 (Rp)
Tanah	293,851,434,073.57
Peralatan dan mesin	276,403,033,529.27
Gedung dan bangunan	717,662,200,487.45
Jalan, irigasi dan jaringan	1,194,390,615,189.45
Aset tetap lainnya	9,205,234,945.16
Konstruksi dalam pengerjaan	33,811,868,105.72
Akumulasi penyusutan	(736,682,611,196.64)
Jumlah aset tetap	1,788,641,774,533.98

Sumber: Data diolah, 2022.

Tabel 3. Aset Tetap Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2020

Nama aset	Tahun 2020 (Rp)
Tanah	295.556.894.172,98
Peralatan dan mesin	300.313.019.797,94
Gedung dan bangunan	770.886.860.400,65
Jalan, irigasi dan jaringan	1.308.345.092.031,17
Aset tetap lainnya	13.701.120.693,04
Konstruksi dalam pengerjaan	57.776.169.188,88
Akumulasi penyusutan	(837.644.832.861,70)
Jumlah aset tetap	1.908.934.321.422,97

Sumber: Data diolah, 2022.

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, sehingga SAP ini dapat disajikan pedoman bagi pemerintah khususnya badan pengelola keuangan aset daerah dalam membuat pertanggungjawaban. Dengan menggunakan SAP (Laming & Amri, 2021) maka laporan keuangan pemerintah diharapkan lebih informatif dan pemakai laporan keuangan dapat menilai akuntabilitas atas perolehan dan manfaat sumber daya. analisis terhadap aset tetap pengelola keuangan aset daerah sebagai berikut:

1. Tanah

Menurut SAP, aset tanah dicatat di neraca sebesar biaya perolehan, dan apabila tidak memungkinkan atau sulit diperoleh nilai historisnya maka menggunakan nilai yang dapat diestimasi. Pada Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang aset tanah dinilai sebesar biaya perolehan, dan bagi aset tanah yang tidak memiliki nilai historis dinilai berdasarkan harga yang wajar (diestimasi). Pada tahun 2019, saldo tanah sebesar Rp. 293.851.434.073,57 dan pada tahun 2020 terdapat realisasi tanah sebesar Rp. 1.705.470.099,41 sehingga saldo tanah pada tahun 2020 sebesar Rp. 295.556.894.172,98

2. Peralatan dan Mesin

Menurut SAP, peralatan dan mesin dicatat di neraca sebesar harga perolehan dan mempunyai masa manfaat 12 bulan atau lebih. Sedangkan dalam neraca Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang, aset peralatan dan mesin dicatat sebesar harga perolehan dan mempunyai masa manfaat 12 bulan atau lebih. Pada tahun 2019, saldo peralatan dan mesin adalah sebesar Rp. 276.403.033.529,27 pada tahun 2020, terdapat realisasi belanja modal untuk peralatan dan mesin sebesar Rp. 20.909.986.268,67 sehingga saldo peralatan dan mesin pada Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang selama 2 tahun dari tahun 2019-2020 sebesar Rp. 300.313.019.797,94.

3. Gedung Dan Bangunan

Menurut SAP, aset gedung dan bangunan dicatat dalam neraca sebesar harga perolehan dan mempunyai masa manfaat 12 bulan atau lebih. Sedangkan dalam neraca Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang, aset gedung dan bangunan sebesar harga perolehan dan mempunyai masa manfaat 12 bulan. Pada tahun 2019, saldo aset gedung dan bangunan adalah sebesar Rp. 717.662.200.489,45 pada tahun 2020 terdapat realisasi belanja modal untuk pengadaan aset gedung dan bangunan sebesar Rp. 53,224,659,913.2 sehingga saldo gedung dan bangunan pada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang selama 2 tahun dari tahun 2019-2020 sebesar Rp. 770.888.860.400,65.

4. Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Menurut SAP, aset jalan, irigasi dan jaringan dicatat dalam neraca sebesar harga perolehan dan mempunyai masa manfaat 12 bulan atau lebih. Sedangkan dalam Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang, aset jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebesar harga perolehan dan mempunyai manfaat 12 bulan. pada tahun 2019, aset jalan, irigasi dan jaringan adalah sebesar Rp. 1.194.390.615.189,45. pada tahun 2020 terdapat realisasi belanja modal untuk pengadaan aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp. 113.954.476.842,28 sehingga saldo jalan, irigasi dan jaringan pada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang selama 2 tahun dari tahun 2019-2020 sebesar Rp. 1.308.345.092.031,17.

5. Aset Tetap Lainnya

Menurut SAP, aset tetap lainnya dicatat dalam neraca sebesar harga perolehan dan mempunyai masa manfaat 12 bulan atau lebih. Sedangkan dalam Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang, aset tetap lainnya dicatat berdasarkan harga perolehan dan mempunyai masa manfaat 12 bulan atau lebih yaitu 4 tahun. pada tahun 2019, saldo aset tetap lainnya sebesar Rp. 9.205.234.945,16. pada tahun 2020 terdapat realisasi belanja modal sebesar Rp. 4.495.885.747,88 sehingga saldo aset tetap lainnya pada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang selama 2 tahun dari tahun 2019-2020 sebesar Rp. 13.701.120.693,04.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Menurut SAP, aset konstruksi dalam pengerjaan dicatat dalam neraca sebesar harga perolehan dan mempunyai masa manfaat 12 bulan atau lebih. Sedangkan dalam Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang, aset konstruksi dalam pengerjaan dicatat berdasarkan harga perolehan dan mempunyai masa manfaat 12 bulan. Pada tahun 2019 saldo konstruksi dalam pengerjaan adalah sebesar Rp. 33.811.868.105,72. Pada tahun 2020 terdapat realisasi belanja modal sebesar Rp. 23.964.299.082,72 sehingga saldo konstruksi dalam pengerjaan Pada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang selama 2 tahun dari tahun 2019-2020 sebesar Rp. 57.776.167.188,70.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomis masa depan dapat diperoleh atau diterima serta disahkan hak kepemilikannya dan nilainya dapat diukur secara andal. Pencatatannya sebesar harga perolehannya. Aset tetap BKAD ada yang diperoleh dari APBD, pemerintah provinsi, pembelian dan donasi. Pengakuan aset tetap menggunakan metode *accrual*. Aset tetap pada BKAD mempunyai masa manfaat ekonomis 12 bulan sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintah. Yaitu: aset memiliki wujud fisik, mempunyai manfaat 12 bulan, dapat diukur secara andal, tidak digunakan untuk dijual.

7. Pengukuran Aset Tetap

Hasil dari perbandingan Pengukuran Aset Tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 pernyataan nomor 07, dimana Aset tetap yang dinilai dengan biaya perolehan apabila Penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan (Amri & Laming, 2020). Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai aset lainnya. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dengan pos aset tetap.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga barang atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa asset (Syukur dkk, 2021) tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Suatu aset tetap dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikannya aset yang serupa, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui didalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang lepas. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

8. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal

Hasil dari perbandingan pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 (SAP) Pernyataan Nomor 07, dimana Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Dimana metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah (Trisnawati, 2015). Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintah dan rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Penyusutan nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tersebut, maka diterapkan masa manfaat dari masing-masing kelompok aset tetap. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan.

Hasil dari perbandingan Penghentian dan Pelepasan pada Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 (SAP) pernyataan Nomor 07, dimana Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penghentian dan pelepasan aset tetap didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Aset-aset yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah, maka aset tetap tersebut direklasifikasi dalam kelompok aset lainnya. Suatu aset tetap dilepaskan atau dihentikan secara permanen setelah mendapatkan persetujuan penghapusan sesuai ketentuan yang berlaku, maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca. Beberapa keadaan dan alasan penghentian aset tetap antara lain adalah dihibahkan, dipertukarkan dengan aset tetap lainnya (Wisnantiasri, 2018). Dijadikan penyertaan modal, dijual dan dimusnahkan apabila aset daerah tidak bisa difungsikan lagi dan selain itu tidak bisa difungsikan, juga telah memenuhi persyaratan untuk dimusnahkan.

Tabel 4. BKAD Kabupaten Enrekang Neraca

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Tanah	295.556.894.172,98	293.851.434.073,57
Peralatan dan mesin	300.313.019.797,94	276.403.033.529,27
Gedung dan bangunan	770.886.860.400,65	717.662.200.487,45
Jalan, irigasi dan jaringan	1.308.345.092.031,17	1.194.390.615.189,45
Aset tetap lainnya	13.701.120.693,04	9.205.234.945,16
Konstruksi dalam pengerjaan	57.776.169.188,88	33.811.868.105,72

Akumulasi penyusutan	(837.644.832.861,70)	(736.682.611.196,64)
Total aset tetap	1.908.934.321.422,97	1.788.641.774.533,98

Sumber: Data diolah, 2022.

Tabel 5. Rincian Aset Tetap

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Perubahan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Tanah	293.851.434.073,57	295.556.894.172,98	1.705.460.099,41
Peralatan dan mesin	276.403.033.529,27	300.313.019.797,94	20.909.986.268,67
Gedung dan bangunan	717.662.200.487,45	770.886.860.400,65	53.224.659.913,20
Jalan, irigasi dan jaringan	1.194.390.615.189,45	1.308.345.092.031,17	113.954.476.842,28
Aset tetap lainnya	9.205.234.945,16	13.701.120.693,04	4.495.885.747,88
Konstruksi dalam pengerjaan	33.811.868.105,72	57.776.169.188,88	23.964.301.083,16

Sumber: Data diolah, 2022.

Penyajian aset tetap pada laporan keuangan BKAD Kabupaten Enrekang menyajikan secara terpisah seperti tanah, bangunan dan gedung, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Serta menyajikan aset tetap dalam neraca sebesar harga perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan. begitu juga dengan akumulasi penyusutan (Safitrid kk, 2019), kita bisa mengetahui saldo dari akumulasi penyusutan pada akhir tahun atau periode dalam daftar aset tetap. Serta setiap akhir periode, jumlah tercatat aset tetap direkonsiliasi untuk dilaporkan tentang jumlah penambahan, mutasi aset tetap dan lain- lain. BKAD Kabupaten Enrekang telah menyajikan komponen aset tetapnya dengan benar pada laporan posisi keuangan, hanya saja, penyajian akumulasi penyusutannya tidak dilakukan secara terpisah yaitu akumulasi penyusutan seluruh aset tetap digabungkan dalam satu nilai sehingga tidak dapat dilihat langsung berapa akumulasi penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap. Semua aset yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang sudah disajikan dalam neraca sebesar harga perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan untuk setiap akhir periode, jumlah tercatat aset tetap direkonsiliasikan untuk dilaporkan tentang jumlah penambahan, mutasi aset tetap dan lain- lain.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang berpedoman pada

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 (SAP) Pernyataan Nomor 07 serta Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2016 tentang aset tetap yang sudah menerapkan SAP berbasis akrual yang artinya bahwa semua perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang yang terdiri dari pembagian aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, pengeluaran setelah perolehan awal, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan aset tetap. Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Enrekang melakukan penyusutan menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan aset tetap sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07. Hal ini dikarenakan di dalam SAP apabila masa manfaat sudah habis masa manfaatnya tidak digunakan lagi.

Referensi :

- Amri, N. F., & Laming, R. F. (2020). Praktisi Akuntansi Di Kota Makassar: Pendapatan Driver Transportasi Berbasis Online. *Jurnal Mirai Management*, 5(2).
- Amri, N. F., Laming, R. F., & Thanwain, T. (2022). Sistem Pengendalian Intern (SPI) Menjadi Dalang Problematika Akuntansi. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(1), 677-684.
- [Ardana, I.C., & Lukman, H. \(2016\). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.](#)
- Baso, R., Bintary, Selviani,. & Sumarni. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). (online). Vol. 1. No. 1. [http://doi.org/10.37531/ecotal.v1i1.6.](http://doi.org/10.37531/ecotal.v1i1.6)
- Hasniati, H., Indriasari, D. P., & Sirajuddin, A. (2022). Marketing Mix Analysis on Increasing Sales Volume at Perumnas Branch I Tamalanrea in Makassar. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(7), 10-21. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i7.357>
- Herison, R., Sahabuddin, R., Azis, M., & Azis, F. (2022). The Effect of Working Capital Turnover, Accounts Receivable Turnover and Inventory Turnover on Profitability Levels on the Indonesia Stock Exchange 2015-2019. *Psychology And Education*, 59(1), 385-396.
- [Idris, M. \(2019\). *Manajemen Keuangan*, Fakultas Ekonomi Bosowa Makassar, Indonesia.](#)
- [Ikatan Akuntansi Indonesia. \(2016\). *Standar Akuntansi Keuangan Revisi 2016*. Salemba Empat. Jakarta. IAI.](#)
- Ismail, M., Sahabuddin, R., Idrus, M. I., & Karim, A. (2022). Faktor Mempengaruhi Keputusan Pembelian pada Online Marketplace pada Mahasiswa Universitas Hasanuddin. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(1), 49-59. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1831>
- Jumarding, A., Mane, A. A., & Karim, A. (2021). Desa wisata menunjang transformasi ekonomi nasional di kabupaten Enrekang.
- Karim, A. (2020). Endemic rice Pulu'Mandoti supports the economy and food security at Salukanan community during Covid-19 global pandemic crisis. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(9), 793-796.
- Karim, A. (2020). Peningkatan Ekonomi Pedesaan dalam Menunjang Pergerakan Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Masa Pandemic Global. *Tersedia (Online): https://bit.ly/3iKMIr0*. [Diunduh, 04 Juni 2021].

- Karim, A., Musa, C. I., Sahabuddin, R., & Azis, M. (2021). The Increase of Rural Economy at Baraka Sub-District through Village Funds. *The Winners*, 22(1).
- Karim, A., Syamsuddin, I., Jumarding, A., & Amrullah, A. (2022). The Effect of Gender Independence and Leadership Style on Audit Quality in Makassar Public Accounting Offices. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(7), 114-126. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v5i7.341>
- Laming, R. F., & Amri, N. F. (2021). WHISTLEBLOWING PADA INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA. *SIMAK*, 19(02), 328-338.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta, Indonesia.
- Rabiyah, U., Suryani, A., & Karim, A. (2021). The Effect of Awareness, Fiscus Services and Taxation Knowledge on Taxpayer Compliance at Madya Makassar Kpp. *International Journal of Innovation Scientific Research and Review*, 3(1), 797-799.
- Raki, A. (2019). Analisis Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Angkat Berdasarkan PSAP Nomor 07 Tahun 2010. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Safitri, A., Lestari, U. P., & Nurhayati, I. (2019, August). Analisis dampak penerapan PSAK 73 atas sewa terhadap kinerja keuangan pada industri manufaktur, pertambangan dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 10, No. 1, pp. 955-964).
- Setiawan, A., Amri, N. F., & Darmala, M. R. (2020). PENGARUH INTERNET BANKING DAN DIGITAL MARKETING TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK BNI SYARIAH MAKASSAR. *Jurnal Mirai Management*, 5(1), 270-280.
- Syamsuddin, I., Muhammad, P. N., & Karim, A. (2022). Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 170-177.
- Syukur, A., Novianti, A. S., & Karim, A. (2021). Financial Ratio Analysis of Pt. Semen Tonasa Before and After Joining the Semen Indonesia Group. *International Journal of Engineering Technology Research & Management*, 5(1), 11-17.
- Trisnawati, D. M. F. (2015). Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. *Kutubkhanah*, 17(1), 40-59.
- Wisnantiasri, S. N. (2018). Pengaruh PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan terhadap Shareholder Value. *Widyakala: Journal of Pembangunan Jaya University*, 5(1), 60-65.